

SKRIPSI

**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH BERBASIS EVALUASI PROGRAM KOTAKU
(Studi Kasus: Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo)**

Disusun dan diajukan oleh:

NAFIQAH AMANDAH

D101 18 1024



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2024

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH BERBASIS EVALUASI PROGRAM KOTAKU
(Studi Kasus: Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo)**

Disusun dan diajukan oleh

NAFIQAH AMANDAH

D101 18 1024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 November 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

kelulusan
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001

Pembimbing Pendamping,



Sri Aliah Ekawati, ST., MT
NIP. 19850824 201212 2 004

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nafiqah Amandah
NIM : D101181024
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Evaluasi Program KOTAKU (Studi Kasus: Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo)

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasi oleh penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 15 November 2024

Yang Menyatakan,



(Nafiqah Amandah)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin dengan baik.

Penetapan judul ini, berangkat dari keresahan penulis terhadap permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae yang merupakan salah satu wilayah permukiman kumuh yang ada di Kota Palopo yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 351/VIII/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh. Kelurahan Ponjalae memiliki potensi dari segi sumber daya laut namun potensi tersebut tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang ada. Hal ini berdasarkan kondisi eksisting dimana lingkungan permukiman ponjalae masih belum tertata dengan baik sehingga terkesan kumuh dan kondisi ekonomi masyarakat permukiman ponjalae yang masih tergolong lemah dimana rata-rata masyarakatnya berpenghasilan menengah kebawah. Dengan itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh, dan juga menilai persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan program KOTAKU dalam menangani masalah kumuh di Kelurahan Ponjalae, serta hasil yang ingin dicapai yaitu berupa strategi pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo.

Kelebihan penelitian ini dari penelitian lainnya adalah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae. Oleh karena itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi manfaat berupa alternatif dalam peningkatan kualitas permukiman di Kelurahan Ponjalae, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang juga ingin meneliti terkait peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terkhusus bagi pemerintah Kota Palopo untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.

Gowa, 15 November 2024



(Nafiqah Amandah)

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut:

Amandah, Nafiqah. 2024. *Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (Studi kasus: Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo)*. Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin. Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut: nafiqahamandah21@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang telah menjadi penuntun hidup menuju zaman yang berilmu seperti saat ini. Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menuntun penulis, memberikan kemudahan, kemampuan, kekuatan, dan atas izin-nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orangtua tercinta (Bapak Awaluddin dan Ibu Nursarangnga), saudara/i tercinta (Kiki Resky Amalia, S.Kep dan Bhild Faiz Aditya) dan nenek tercinta yang selama ini senantiasa memberikan doa, ridho, nasihat serta dukungan tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) atas dukungan dan bantuannya kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi ini;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.) atas nasihat dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan;
5. Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Ir. Abdul Rahman Rasyid, ST., M.Si.) dan Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati ST., MT.) atas bimbingan akademik dan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
6. Dosen Penasihat Akademik (Bapak Laode Muh Asfan Mujahid ST., MT) atas arahan, bimbingan, serta nasihat dan bantuannya selama penulis menjalankan perkuliahan;
7. Dosen Pembimbing Utama (Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin M.Si) yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, bimbingan, serta motivasi yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Dosen Pembimbing Pendamping (Ibu Sri Aliah Ekawati ST., MT.) yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, bimbingan, serta motivasi yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr. Techn Yashinta K.D Sutopo ST., MIP) atas segala nasihat, bimbingan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta bantuannya selama menjalankan perkuliahan;
10. Dosen Penguji (Bapak Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D., IPU) dan (Bapak Irwan ST., M.Eng.) atas kritik, saran, serta arahan yang diberikan kepada penulis;
11. Seluruh dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan;
12. Seluruh staf administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota (Bapak Haerul Muayyar, S. Sos dan Bapak Faharuddin) serta *cleaning service* di Departemen

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas kesabaran, kebaikan, dan bantuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan;

13. Teman-teman *Labo-based Education* (LBE) Perumahan dan Permukiman serta teman-teman angkatan 2018 atas kebersamaan dan kerja samanya selama masa perkuliahan; dan
14. Seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berlipat ganda atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Gowa, 15 November 2024



(Nafiqah Amandah)

ABSTRAK

NAFIQAH AMANDAH. *Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo* (dibimbing oleh Mimi Arifin dan Sri Aliah Ekawati)

Kelurahan Ponjalae merupakan salah satu permukiman kumuh yang ada di Kota Palopo. Berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Nomor 351/VIII/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palopo. Kelurahan ini belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat ditinjau dari kondisi bangunan, kondisi persampahan, kondisi air limbah, kondisi jalan, kondisi drainase, dan kondisi sarana proteksi kebakaran yang belum sesuai dengan standar kualitas lingkungan permukiman. Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui karakteristik permukiman kumuh; (2) mengetahui persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan program KOTAKU; (3) merumuskan strategi pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif kuantitatif, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik permukiman kumuh yang ditinjau dari aspek fisik yaitu kondisi bangunan memiliki tingkat keteraturan tinggi, dengan kepadatan bangunan rendah yang didominasi oleh bangunan semi permanen. Kondisi jalan terdapat kerusakan. Kondisi drainase yang mengalami sedimentasi dan adanya tumpukan sampah. Kondisi air bersih yang bersumber dari PDAM. kondisi persampahan yang kurang memadai dan adanya timbulan sampah. Kondisi air limbah terdapat beberapa bangunan yang tidak memiliki septictank dan belum tersedia sarana proteksi kebakaran. Selain itu, aspek non fisik yang ditinjau dari kondisi sosial masyarakat yaitu tingkat kekerabatan dan tradisi yang masih terjaga dengan baik, dan kondisi ekonomi masyarakat yang didominasi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini juga menilai persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan program KOTAKU di RT 15 RW 4 yang menunjukkan bahwa semua tahapan dinilai efektif. Tahap Persiapan memperoleh nilai rata-rata 0,859, tahap perencanaan mendapatkan nilai rata-rata 0,661, tahap pelaksanaan dengan nilai rata-rata 0,698, dan tahap keberlanjutan memperoleh nilai rata-rata 0,576. Secara keseluruhan, meskipun semua tahapan dinilai efektif, fokus utama harus diberikan pada peningkatan tahap keberlanjutan untuk memastikan daya tahan program dalam jangka panjang. Adapun strategi yang diusulkan dalam meningkatkan pelaksanaan program adalah mengoptimalkan potensi sumber daya kawasan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Ponjalae serta memanfaatkan potensi sosial masyarakat dalam pengadaan program KOTAKU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh.

Kata Kunci: Peningkatan Kualitas, Permukiman Kumuh, Strategi, Kelurahan Ponjalae, SWOT

ABSTRACT

NAFIQAH AMANDAH. *Strategy for Improving the Quality of Slums in Ponjalae Village, Palopo City (supervised by Mimi Arifin and Sri Aliah Ekawati)*

Ponjalae Village is one of the slums in Palopo City. Based on the Mayor's Decree Number 351/VIII/2021 concerning the Determination of the Location of Slum Housing and Slum Settlements in Palopo City. This village does not yet have adequate facilities and infrastructure which can be seen from the condition of the buildings, garbage conditions, wastewater conditions, road conditions, drainage conditions, and fire protection facilities that do not meet the environmental quality standards of the settlement. The objectives of this study: (1) to determine the characteristics of slums; (2) to determine public perceptions of the stages of implementing the KOTAKU program; (3) to formulate a strategy for implementing the KOTAKU program in handling slums. This study uses qualitative descriptive analysis methods, quantitative qualitative descriptive analysis, and SWOT analysis. The results of the study indicate that the characteristics of slum settlements reviewed from the physical aspect are the condition of the building has a high level of order, with low building density dominated by semi-permanent buildings. Road conditions are damaged. Drainage conditions that experience sedimentation and piles of garbage. Clean water conditions sourced from PDAM. Inadequate waste conditions and the presence of garbage. Wastewater conditions include several buildings that do not have septic tanks and fire protection facilities are not yet available. In addition, non-physical aspects reviewed from the social conditions of the community are the level of kinship and tradition that are still well maintained, and the economic conditions of the community are dominated by working as fishermen with an average income of low-income people. This study also assessed community perceptions of the stages of implementing the KOTAKU program in RT 15 RW 4 which showed that all stages were considered effective. The Preparation stage obtained an average value of 0.859, the planning stage obtained an average value of 0.661, the implementation stage with an average value of 0.698, and the sustainability stage obtained an average value of 0.576. Overall, although all stages are considered effective, the main focus should be given to improving the sustainability stage to ensure the program's long-term sustainability. The proposed strategy in improving program implementation is to optimize the potential of regional resources in increasing the economic income of the community in Ponjalae Village and utilize the social potential of the community in the procurement of the KOTAKU program to increase community participation in handling slums.

Keywords: *Quality Improvement, Slums, Strategy, Ponjalae Village, SWOT*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Permukiman	5
2.1.1. Permukiman Kumuh	5
2.1.2. Karakteristik Permukiman Kumuh	6
2.1.3. Kriteria Permukiman Kumuh	11
2.1.4. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh	12
2.2. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	13
2.2.1. Pengertian KOTAKU	13
2.2.2. Tujuan Program KOTAKU	14
2.2.3. Tahapan Kegiatan Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa	15
2.2.4. Evaluasi Program KOTAKU	20
2.3. Peningkatan Kualitas Permukiman	22
2.4. Penelitian Terdahulu	24
2.5. Kerangka Konsep	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	31
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.6. Teknik Analisis Penelitian	34
3.7. Kebutuhan Data	38
3.8. Definisi Operasional	40
3.9. Kerangka Penelitian	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum.....	43
4.1.1. Gambaran Umum Kota Palopo.....	43
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Wara Timur.....	47
4.1.3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.2. Karakteristik Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae.....	51
4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program KOTAKU Pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae.....	69
4.3.1 Tahapan Pelaksanaan Program KOTAKU	70
4.4. Strategi Pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae	84
4.4.1 Identifikasi faktor internal dan eksternal	84
4.4.2 Matriks Faktor Internal dan Ekternal.....	86
BAB V PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100
<i>CURRICULUM VITAE</i>	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konsep.....	28
Gambar 2	Peta Lokasi Penelitian (Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Ponjalae).....	30
Gambar 3	Kerangka Penelitian.....	42
Gambar 4	Peta Administrasi Kota Palopo.....	45
Gambar 5	Peta Administrasi Kecamatan Wara Timur.....	48
Gambar 6	Peta Ketidakteraturan Bangunan.....	54
Gambar 7	Peta Kualitas Bangunan	55
Gambar 8	Peta Legalitas Bangunan.....	56
Gambar 9	Kondisi Jalan Berdasarkan Material	57
Gambar 10	Peta Kondisi Jaringan Jalan Permukiman Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	58
Gambar 11	Jenis Drainase.....	59
Gambar 12	Peta Jaringan Drainase Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	60
Gambar 13	Peta Kondisi Air Bersih Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	62
Gambar 14	Kondisi Sampah di Depan Rumah Masyarakat.....	63
Gambar 15	Kondisi Tumpukan Sampah.....	63
Gambar 16	Peta Jalur Persampahan Kawasan Permukiman Kumuh.....	64
Gambar 17	Peta Rumah yang Memiliki <i>Septictank</i>	66
Gambar 18	Kegiatan Gotong Royong di Kelurahan Ponjalae.....	68
Gambar 19	Diagram Masyarakat Mengetahui Program Kotaku.....	70
Gambar 20	Diagram Masyarakat Ikut Dalam Kegiatan Sosialisasi.....	71
Gambar 21	Diagram Masyarakat Mendapat Informasi Terkait Rencana Program.....	72
Gambar 22	Diagram Masyarakat Mengemukakan Kondisi Lingkungan Permukiman Ideal Yang diinginkan	74
Gambar 23	Diagram Masyarakat Terlibat dalam Merumuskan Masalah-Masalah Kekumuhan	75
Gambar 24	Diagram Masyarakat Mengetahui Adanya Dokumen RPLP Sebagai Pedoman dalam Penanganan Permukiman Kumuh.....	76
Gambar 25	Diagram Masyarakat Ikut Terlibat dalam Penyusunan Dokumen RPLP.....	76
Gambar 26	Diagram Masyarakat Terlibat dalam Pembangunan Kegiatan Infrastruktur.....	79
Gambar 27	Diagram Infrastruktur Yang dibangun Sudah Tepat dan Bermanfaat Bagi Masyarakat.....	80
Gambar 28	Diagram Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).....	81
Gambar 29	Diagram Lembaga Masyarakat Yang di bentuk Oleh Kotaku Masih Aktif.....	82
Gambar 30	Diagram Pemeliharaan Infrastruktur Yang dibangun.....	83
Gambar 31	Matriks Kartesius SWOT.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Kepadatan Bangunan.....	7
Tabel 2	Indikator Tahapan Pelaksanaan Program Kotaku.....	20
Tabel 3	Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4	Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu dengan Taraf Kesalahan 1%, 5%, dan 10%	33
Tabel 5	Penilaian Skor Skala <i>Guttman</i>	35
Tabel 6	Kriteria Efektifitas.....	35
Tabel 7	Matriks Analisis Swot.....	36
Tabel 8	Kebutuhan Data.....	38
Tabel 9	Luas Wilayah Kota Palopo Menurut Kecamatan.....	43
Tabel 10	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palopo	44
Tabel 11	SK Walikota Palopo Tentang Lokasi Permukiman Kumuh Kota Palopo.....	46
Tabel 12	Luas Wilayah Kecamatan Wara Timur Menurut Kelurahan.....	47
Tabel 13	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Wara Timur.....	49
Tabel 14	Klasifikasi Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	49
Tabel 15	Ketidakteraturan Bangunan.....	50
Tabel 16	Kepadatan Bangunan.....	52
Tabel 17	Jenis Bangunan.....	52
Tabel 18	Legalitas Bangunan.....	53
Tabel 19	Kualitas Jalan Kawasan Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	57
Tabel 20	Panjang Drainase Kawasan Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	59
Tabel 21	Tingkat Pendidikan Masyarakat Pada Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	67
Tabel 22	Mata Pencaharian Masyarakat Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	68
Tabel 23	Tingkat Pendapatan Masyarakat Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Ponjalae.....	69
Tabel 24	Nilai Index RII dari Variabel Tahap Persiapan.....	72
Tabel 25	Nilai Index RII dari Variabel Tahap Perencanaan.....	77
Tabel 26	Program Pelaksanaan Kotaku di Kelurahan Ponjalae.....	78
Tabel 27	Nilai Index RII dari Variabel Tahap Pelaksanaan.....	81
Tabel 28	Nilai Index RII dari Variabel Tahap Keberlanjutan.....	83
Tabel 29	Matriks Analisis SWOT Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae.....	87
Tabel 30	Matriks IFAS Pelaksanaan Program KOTAKU dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae.....	89
Tabel 31	Matriks EFAS Pelaksanaan Program KOTAKU dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2011). Terjadinya peningkatan permukiman kumuh di daerah perkotaan umumnya disebabkan oleh kurangnya perencanaan kota dan kebijakan permukiman (Uddin dalam Riyulida & Sunarti, 2019).

Permukiman kumuh pada suatu wilayah merupakan imbas dari adanya peningkatan konsentrasi permukiman yang tidak diikuti dengan peningkatan prasarana dan sarana permukiman. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan terhadap prasarana dan sarana permukiman. Ketersediaan prasarana dan sarana merupakan suatu kelengkapan fasilitas lingkungan permukiman yang dapat menunjang setiap kegiatan yang terjadi didalam lingkungan permukiman. Fasilitas yang tersedia berupa prasarana lingkungan meliputi jaringan jalan, air bersih, drasinase, persampahan, listrik, telepon serta sarana lingkungan berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, dan pelayanan umum serta olahraga dan rekreasi (Sari dan Ridlo, 2021).

Kelurahan Ponjalae merupakan salah satu kelurahan di Kota Palopo yang memiliki kondisi permukiman belum tertata dengan baik, sehingga perlu untuk diperhatikan. Berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Nomor 351/VIII/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palopo, bahwa Kelurahan Ponjalae termasuk kawasan permukiman kumuh dengan luasan kumuh yaitu 14,14 Ha. Kelurahan ini belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat ditinjau dari kondisi bangunan, kondisi persampahan, kondisi air limbah, kondisi jalan, kondisi drainase, dan kondisi sarana proteksi kebakaran yang belum sesuai dengan standar kualitas lingkungan permukiman. Dalam Rasyid

(2017) menjelaskan bahwa terdapat interkoneksi drainase, adanya sampah dan rumput-rumput liar di saluran drainase sehingga pengaliran tidak berjalan dengan baik. Selain itu, terdapat pula timbunan sampah pribadi dan terdapat beberapa bangunan belum memiliki jaringan air limbah.

Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-2032, Kelurahan Ponjalae diperuntukan sebagai kawasan perumahan dan kawasan fasilitas umum serta fasilitas sosial (pasal 53), kawasan perdagangan dan jasa (pasal 55), serta kawasan perkantoran (pasal 56). Hal ini menjadikan kelurahan Ponjalae menjadi kawasan strategis kota dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi (pasal 60). Adapun program yang telah dilakukan dalam menangani masalah permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae yaitu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mulai berjalan di lokasi dari tahun 2018 di mana pembenahan yang dilakukan terhadap lingkungan permukiman kumuh dalam hal ini aspek fisik, khususnya pada kondisi jalan, dan drainase (saluran pembuangan air kotor) (berdasarkan wawancara dengan kepala seksi 3, Aswin). Namun, belum menyentuh permasalahan infrastruktur yang lainnya sehingga lokasi penelitian masih terlihat kumuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program KOTAKU pada permukiman kumuh, serta merumuskan strategi pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan program KOTAKU pada permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae.
2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan program KOTAKU pada permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae.
3. Mengetahui strategi pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
Sebagai referensi bagi masyarakat dalam rangka menambah wawasan mengenai permukiman kumuh
2. Bagi Pemerintah
Memberikan kajian materi dan data seputar permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae, yang kemudian dapat menjadi dasar perencanaan dalam penanganan permukiman kumuh
3. Bagi Pendidikan
Studi ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup wilayah
Ruang lingkup wilayah ini yaitu di Kelurahan Ponjalae dengan fokus penelitian berada pada deliniase kumuh, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
2. Ruang lingkup materi
Batasan ruang lingkup yang akan di kaji dalam penyusunan penelitian ini yakni mengenai karakteristik permukiman kumuh, diantaranya karakteristik fisik dan

non fisik dan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan program KOTAKU serta strategi pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi enam bab dengan rincian susunan dan pembahasan untuk masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan lingkup wilayah studi, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permukiman kumuh yang memuat pengertian permukiman kumuh, kriteria permukiman kumuh, karakteristik fisik dan non fisik permukiman kumuh, program KOTAKU yang memuat pengertian program KOTAKU, tujuan KOTAKU, tahapan kegiatan program KOTAKU, evaluasi program KOTAKU serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN membahas terkait langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN membahas tentang gambaran umum pada lokasi penelitian dan hasil dari jawaban pertanyaan penelitian terkait karakteristik permukiman kumuh, persepsi masyarakat terhadap kualitas lingkungan permukiman, serta strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh pada Kelurahan Ponjalae.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta saran yang diajukan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Permukiman

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Menurut Aguspriyanti dkk. (2020) permukiman adalah suatu kawasan yang didiami oleh sekelompok masyarakat yang membangun rumah diatas lahan kosong, sehingga menyebabkan pola penataan pada kawasan tersebut cenderung menjadi tidak beraturan. Sedangkan menurut Kuswartojo dan Salim (1997) dalam Nurokhman (2019) permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya).

2.1.1. Permukiman Kumuh

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Haryanto (2006) dalam Dzulqarnain (2018) permukiman kumuh adalah tempat atau hunian masyarakat pada permukiman yang dimana kondisinya sangat buruk dilihat dari kondisi rumah, sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan menurut Yudohusodo (1991) dalam Asmariati, dkk (2020) permukiman kumuh merupakan suatu tempat dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya yang tidak

beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana, dan sarana air bersih) bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara regular tiap tahun banjir.

2.1.2. Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh seringkali digambarkan sebagai kawasan yang tidak teratur, kurang memadai dari segi kualitas pelayanan dasar, serta erat kaitannya dengan masyarakat menengah ke bawah (kemiskinan) (Pasaribu & Jeumpa, 2021). Karakteristik permukiman kumuh dilihat dari dua aspek, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Fisik

Karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman diantaranya kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi serta kondisi sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Adapun karakteristik fisik permukiman kumuh sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh

Prasarana menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar pemenuhan tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Adapun prasarana permukiman kumuh diantaranya, yaitu:

1) Kondisi bangunan

Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut :

a) Ketidakteraturan bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR. KDB yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
- (2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR. KLB yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
- (3) Klasifikasi tingkat kepadatan bangunan
Kepadatan bangunan dinyatakan dalam unit/Ha. Adapun klasifikasi kepadatan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Klasifikasi Kepadatan Bangunan

Kepadatan Bangunan	Klasifikasi
Tinggi	>100 unit/Ha
Sedang	60 – 100 unit/Ha
Rendah	<60 Unit/Ha

Sumber: PUPR, 2006

c) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis meliputi: pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; keselamatan bangunan gedung; kesehatan bangunan gedung; kenyamanan bangunan gedung; dan kemudahan bangunan gedung

2) Kondisi jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan roli, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Kondisi jalan dengan faktor kriteria sebagai berikut:

a) Jalan lingkungan tidak melayani permukiman

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan

3) Kondisi drainase

Kondisi drainase dengan faktor kriterianya sebagai berikut:

a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

b) Ketidaktersediaan drainase

Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

4) Kondisi penyediaan air minum

Kondisi penyediaan air minum dengan faktor kriteria sebagai berikut:

a) Ketidaktersediaan akses aman air minum

Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk akses aman air minum dapat dibangun jaringan perpipaan.

b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

5) Kondisi pengelolaan air limbah

Kondisi pengelolaan air limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut:

- a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat yang dalam contoh pembangunannya.

- b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

6) Kondisi pengelolaan persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut:

- a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- (1) Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga.
- (2) Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan.
- (3) Gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan.

(4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan.

7) Kondisi proteksi kebakaran

Kondisi pengamanan kebakaran dengan faktor kriteria sebagai berikut:

a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: pasokan air dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);

b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi: Alat Pemadam Api Ringan (APAR); mobil pompa; mobil tangga sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung lainnya.

2. Aspek Non Fisik

Selain karakteristik fisik diatas, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh, dari aspek non fisik dibagi menjadi dua diantaranya:

a. Kondisi Sosial Masyarakat

Menurut Dalyono dalam Basrowi dan Juariyah (2010) mengemukakan bahwa kondisi sosial ialah kondisi dimana semua orang dapat mempengaruhi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar dapat mempengaruhi kondisi sosial seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Adapun kondisi sosial masyarakat diantaranya umur dan jenis kelamin, keluarga atau kelompok rumah tangga dan organisasi. Hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah akibat interaksi dengan lingkungan. Adapun ciri sosial masyarakat sebagai berikut:

1) Adat istiadat

- 2) Sikap kekerabatan atau kekeluargaan yang sangat erat.
- 3) Sikap gotong royong yang tinggi

Ketiga sikap telah banyak mewarnai kehidupan masyarakat yang pada umumnya masih bersifat tradisional. Lahirnya sikap ini sebagai akibat dari aktivitas masyarakat yang sering meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga timbul rasa keterkaitan serta keakraban yang tinggi antara keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk saling tolong menolong.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Menurut Abdulsyani dalam Ratnasari (2013) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Adapun kondisi ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- 1) Jenis pekerjaan adalah ragam aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
- 2) Tingkat penghasilan adalah kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh yang masyarakat yang dapat digunakan untuk konsumsi. Tingkat penghasilan dibagi atas dua yaitu: penghasilan bersih dan penghasilan sampingan. Penghasilan sampingan adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan, baik pekerjaan itu didapat ketika jadi buruh, bertani dan berdagang maupun pekerjaan atau kerajinan dalam mengelolah hasil laut lainnya.

2.1.3. Kriteria Permukiman Kumuh

Adapun kriteria atau indikator permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah sebagai berikut:

1. Bangunan gedung; dimana meliputi ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan kualitas bangunan itu sendiri.
2. Jalan lingkungan; dimana meliputi tingkat aksesibilitas kawasan dan kualitas permukaan jalan itu sendiri.

3. Penyediaan air minum/baku; ketidaktersediaan akses aman air minum/baku, serta tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku (60L/orang/hari).
4. Drainase lingkungan; yang dimaksud adalah ketidaktersediaan jaringan drainase, ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan, dan konstruksi drainase lingkungan yang buruk.
5. Pengelolaan air limbah; mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan/atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Pengelolaan persampahan; sarana prasarana dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan teknis serta tidak tepeliharanya sarpras tersebut.
7. Proteksi kebakaran; mencakup ketersediaan sarpras proteksi kebakaran.

2.1.4. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

Penyebab adanya permukiman kumuh adalah pertumbuhan kota yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup dan keterlambatan kota dalam merencanakan dan membangun prasarana pada daerah perkembangan. Menurut Rindarjono dan gamal dalam Araujo, dkk. (2023), penyebab adanya permukiman kumuh dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, faktor lahan perkotaan, faktor ekonomi, dan faktor tata ruang. Sedangkan menurut Apriliani, dkk (2022) faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah aksesibilitas, sosial ekonomi, bangunan, sarana prasarana, serta kependudukan.

Menurut Padyansari, dkk (2023) penyebab adanya permukiman kumuh adalah:

1. Faktor sosial budaya diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, migrasi masuk, lama tinggal penghuni.
2. Faktor ekonomi yaitu tingkat pendapatan
3. Faktor fisik lingkungan diantaranya kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan sistem persampahan, dan jaringan jalan.

Jadi, faktor penyebab munculnya permukiman kumuh adalah tingginya urbanisasi, sarana prasarana, faktor sosial ekonomi, fisik, dan tata ruang

2.2. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota. Selain masalah, permukiman ini juga mendukung perekonomian kota. Untuk mengatasi kompleksitas ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dari tingkat pusat hingga kelurahan, sektor swasta, dan masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah, rasa memiliki masyarakat, keberlanjutan pembangunan, serta kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni.

2.2.1. Pengertian KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan

memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda) (Gea, 2022). Sedangkan menurut Firmansyah., dkk (2023) Program KOTAKU merupakan program pemerintah yang bertujuan membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan program. Penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru.

2.2.2. Tujuan Program KOTAKU

Menurut Tangketau (2021), tujuan pelaksanaan perencanaan program KOTAKU ialah untuk menyeimbangkan akses-akses pelayanan dasar dan infrastruktur terhadap permukiman kumuh di perkotaan untuk menyelenggarakan terwujudnya sebuah cita-cita permukiman perkotaan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal, yang produktif dan juga berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan perencanaan program KOTAKU dapat terwujud dengan:

1. Semakin sempitnya permukaan yang kumuh
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukaan yang kumuh berfungsi dengan tepat;
3. Terbentuknya rancangan-rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang perumahan dan permukiman yang kumuh pada tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Semakin berkembangnya jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan ketersediaan kegiatan dan infrastruktur peningkatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas dan mutu kawasan permukiman yang kumuh;
5. Terimplementasikannya aturan-aturan secara kolektif sebagai bentuk upaya terhadap perubahan perilaku gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat.

2.2.3. Tahapan Kegiatan Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa

Berdasarkan Surat Edaran Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016, Program KOTAKU merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di Indonesia sebagai basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam penyelenggaraan program terdiri dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kolaborasi dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan pembangunan komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk lokakarya sosialisasi di tingkat desa/kelurahan serta pembentukan/penguatan TIPP. Sosialisasi awal program KOTAKU dilakukan melalui berbagai kegiatan dan media, dimulai dari tingkat kecamatan/kelurahan/desa hingga ke tingkat lingkungan, dengan target agar sebanyak mungkin warga kota mengetahui dan memahami program KOTAKU. Tahapan kedua adalah membentuk TIPP, yaitu tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan Permukiman di tingkat kelurahan/desa, yang terdiri dari beberapa pokja minimal sesuai dengan tujuh indikator kumuh atau lebih, tergantung pada kebutuhan masyarakat. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah kecamatan/kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan:

- a. Pemetaan pelaku yang terkait dengan isu kekumuhan di kecamatan maupun di kelurahan/desa. Pelaku tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan TIPP.
- b. Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa.

- c. Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMD Desa, yang terkait dengan program KOTAKU.

2. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang, yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman di tingkat kelurahan/desa. Selanjutnya, dilakukan refleksi mengenai masalah-masalah kritis, seperti kondisi perikehidupan dan penghidupan (livelihood), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana serta difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD mengenai masalah kritis, TIPP melakukan pemetaan swadaya berdasarkan data baseline 100-0-100. Pemetaan ini kemudian diperdalam dengan mempertimbangkan masing-masing aspek, termasuk masalah livelihood, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Hasil kajian pemetaan swadaya TIPP, bersama tim pendamping, dituangkan ke dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh, yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan serta dengan rencana tingkat kota. Adapun tahapan perencanaan secara umum dapat adalah sebagai berikut:

- a. Membangun Visi. Visi permukiman yang dimaksud adalah upaya masyarakat dalam memahami visi pemerintah kabupaten/kota yang terdapat dalam RPJMD, khususnya yang terkait dengan pembangunan permukiman dan pelayanan infrastrukturnya. Membangun visi permukiman dapat dilakukan jika pemerintah kabupaten/kota menyetujui bahwa visi tersebut merupakan pelengkap dari visi yang telah ada. Namun, jika tidak mendapatkan persetujuan, kegiatan selanjutnya akan focus pada penyempurnaan konten misi permukiman. Misi permukiman adalah rumusan, gagasan atau cita-cita masyarakat terhadap kondisi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuannya adalah agar perencanaan

yang dibuat oleh masyarakat lebih terarah dan masyarakat dapat menyusun strategi untuk mengurangi perbedaan antara kondisi saat ini dan visi serta misi yang ingin dicapai.

- b. Refleksi Perkara Kritis (RPK). Berdasarkan hasil visi dan misi permukiman, dilaksanakan RPK dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat, serta menggali akar penyebab dan karakteristik terjadinya kumuh. Ini termasuk merefleksikan tentang penghidupan masyarakat (livelihood), bencana yang pernah terjadi, kesetaraan dan keadilan masyarakat dalam pembangunan, serta dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan permukiman sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar berkontribusi dalam perbaikan kondisi lingkungan permukiman di wilayahnya, dengan menyadari bahwa masyarakat mampu memberikan solusi dan melakukan perbaikan terhadap kondisi lingkungan permukiman yang dapat yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap warga mampu berkontribusi (baik tenaga, waktu, pikiran, uang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) secara bersama-sama melakukan penataan permukiman. Pelaksanaan tahapan kegiatan membangun visi dan misi serta kegiatan RPK dapat dilakukan sesuai ketentuan di atas, namun untuk efektifitas waktu, penyelenggaraan tahap visi dan misi serta RPK dapat dilakukan dalam satu paket dan pada waktu bersamaan.
- c. Pemetaan Swadaya (PS) adalah proses kajian untuk mengenali persoalan (lingkungan, sosial, ekonomi) dan potensi-potensi terkait sumber daya manusia, alam, sosial, ekonomi serta infrastruktur. Proses ini juga mencakup pemetaan akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap kondisi riil/eksisting kawasan permukiman di wilayah kelurahan/desa. Persoalan lingkungan mengacu pada tujuh kriteria kumuh yang mengacu pada Permen PU, yaitu: (1) penataan bangunan, (2) jalan, (3) drainase, (4) air minum, (5) persampahan, (6) sanitasi, dan (7) proteksi kebakaran. Ketersediaan ruang terbuka hijau juga telah disepakati untuk masuk ke dalam kriteria kumuh dari aspek lingkungan ini. Persoalan sosial ekonomi mencakup aspek terkait pentagonal aset, seperti sumber daya manusia, pendapatan, pemilikan aset,

kegiatan ekonomi, serta masalah kerentanan sosial. Data baseline 100-0-100 dan profil permukiman kelurahan/desa merupakan data yang digunakan oleh TIPP untuk memperdalam kegiatan pemetaan swadaya. Data/peta permukiman lainnya, baik yang bersumber dari kelurahan/desa, kecamatan, maupun data/peta dari kabupaten/kota, digunakan sebagai data pendukung untuk memastikan perencanaan tingkat masyarakat (RPLP) terintegrasi dengan perencanaan tingkat kabupaten/kota (RP2KPKP) secara lebih jelas. Pemetaan swadaya dilaksanakan oleh TIPP bersama masyarakat yang dilakukan ditingkat RT/RW/Dusun hingga mencapai kesepakatan mengenai kondisi masalah, potensi dan usulan/gagasan masyarakat dalam upaya mewujudkan visi dan misi masyarakat. Metode yang digunakan dalam pemetaan swadaya ini dapat meliputi transek, wawancara, sensus, FGD, pemetaan tematik, serta rebug warga di tingkat kelurahan/desa untuk menyepakati hasil kajian yang akan dijadikan bahan bagi TIPP dalam menyusun RPLP. Tahapan pemetaan swadaya terdiri dari: persiapan pemetaan, pemetaan dan kajian gambaran umum kelurahan, pemetaan dan kajian profil permukiman/permukiman kumuh, pemetaan gambaran kondisi sosial dan ekonomi, serta pemetaan gambaran kondisi rawan bencana.

d. Tahap Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Tahap pada penyusunan RPLP adalah sebagai berikut:

- 1) RPLP merupakan dokumen perencanaan permukiman kumuh kelurahan/desa yang disusun secara partisipatif dengan mewujudkan keterpaduan/keselarasan perencanaan tingkat kelurahan/desa dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) RPLP merupakan dokumen rencana 5 (lima) tahun sebagai instrumen kolaborasi Kelurahan/Desa dalam penanganan permukiman kumuh yang disusun untuk mencapai 0 persen kumuh di kelurahan dan mencegah tumbuhnya kumuh baru;
- 3) RPLP memuat perencanaan penanganan permukiman kumuh yang komprehensif, mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (livelihood) dan rencana penataan lingkungan permukiman secara spasial, yang terkonsolidasi dengan RP2KPKP maupun rencana peningkatan

kualitas dan pencegahan permukiman kumuh tingkat kota maupun kelurahan lainnya;

- 4) RPLP disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan dan dampak sosial, gender, kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan disabilitas), serta pengurangan resiko bencana;
- 5) RPLP memuat rencana aksi keterpaduan program dari berbagai sumber pendanaan termasuk swadaya masyarakat, yang dibutuhkan untuk mendukung rencana penanganan tujuh aspek kumuh dan sosial ekonomi. RPLP ini disusun oleh TIPP Bersama BKM/LKM yang didampingi oleh pendamping (Tim Fasilitator) dan Tim Koordinator Kota (bila diperlukan). Hasil RPLP ini dilanjutkan dengan penyusunan rencana teknis yang akan dikaji/dibahas lebih mendalam oleh TIPP dilokasi prioritas deliniasi permukiman kumuh yang telah disepakati akan ditangani secara keterpaduan oleh berbagai sektor.

3. Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan, baik dibidang sosial, ekonomi, maupun infrastruktur, yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain APBN/Bantuan investasi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa, swasta, swadaya, dan lain-lain. Pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus memenuhi standar teknis dan berfungsi dengan baik. Secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan;
- b. Kegiatan ekonomi terdiri dari peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut diatur secara rinci dalam POS PPMK.
- c. Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas di tingkat kelurahan/desa, dapat terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, seperti: 1) pelatihan/on the job training kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan

kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; 2) sosialisasi berkelanjutan; 3) Pelatihan on the job training vokasional; pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat; pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; serta kegiatan pemasaran program permukiman. Selain itu, kegiatan sosial lainnya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman.

4. Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam rangka pencegahan serta peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Kolaborasi Secara Menerus
- b. Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan program KOTAKU diatas, indikator-indikator untuk setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Indikator Tahapan Pelaksanaan Program KOTAKU

Variabel	Indikator
Tahap persiapan	1. Masyarakat mengetahui program kotaku 2. Masyarakat ikut dalam kegiatan sosialisasi 3. Masyarakat mendapat informasi terkait rencana program
Tahap perencanaan	4. Masyarakat mengemukakan kondisi lingkungan permukiman ideal yang diinginkan 5. Masyarakat terlibat dalam merumuskan masalah-masalah kekumuhan 6. Masyarakat mengetahui adanya dokumen RPLP sebagai pedoman dalam penanganan permukiman kumuh 7. Masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan dokumen RPLP
Tahap Pelaksanaan	8. Masyarakat terlibat dalam pembangunan kegiatan infrastruktur dalam penanganan permukiman kumuh 9. Infrastruktur yang dibangun sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat 10. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
Tahap Keberlanjutan	11. Lembaga masyarakat yang dibentuk oleh KOTAKU masih aktif 12. Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun

Sumber: Penulis, 2023

2.2.4. Evaluasi Program KOTAKU

Menurut teori William M. Dunn (dalam Nasution & Sihombing, 2024), evaluasi merupakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Secara lebih spesifik, evaluasi memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat yang bisa diukur dengan beberapa indikator, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Dalam mengevaluasi program KOTAKU dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 6 indikator evaluasi program yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program KOTAKU dan pelaksanaan program tersebut.
2. Efisiensi dapat diukur dengan indikator seperti dari segi biaya, segi waktu dan juga segi tenaga. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses
3. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur tingkat kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
4. Pemerataan dapat diketahui melalui jenis manfaat yang diperoleh dan output yang dihasilkan.
5. Ketepatan dapat diukur melalui ketepatan sosialisasi dan ketepatan antara tujuan maupun manfaat program KOTAKU
6. Responsivitas dapat diketahui melalui sikap pemerintah dan sikap masyarakat dengan adanya program KOTAKU

Selain itu, Tangketau (2021) menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi program KOTAKU dapat dilakukan melalui 5 indikator yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan (dampak/manfaat), responsifitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas dapat diukur berdasarkan tujuan dari program KOTAKU dengan output dari pelaksanaan program KOTAKU.
2. Efisiensi dapat diukur berdasarkan seberapa besar usaha yang dilakukan oleh program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh.
3. Kecukupan dapat diukur berdasarkan dampak/manfaat dari program KOTAKU selama pelaksanaan penanganan permukiman kumuh.
4. Responsifitas dapat diukur berdasarkan persepsi masyarakat tentang kepuasan terhadap program KOTAKU.
5. Ketepatan diukur berdasarkan kesesuaian pelaksanaan program KOTAKU terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Ramandei & Nawipa (2023) menyatakan bahwa dalam mengevaluasi program KOTAKU digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program KOTAKU dalam pelaksanaannya untuk menangani dan mencegah kawasan permukiman kumuh. Dalam menilai evaluasi digunakan 3 indikator, yaitu:

1. Tingkat kesesuaian harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program KOTAKU diukur berdasarkan keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan program KOTAKU
2. Manfaat pelaksanaan program diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap manfaat yang dirasakan.
3. Peningkatan aspek pasca pelaksanaan program diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap peningkatan kualitas permukiman dari program yang telah dilaksanakan.

Dalam Ulvansyah, dkk (2023) menjelaskan evaluasi program KOTAKU dapat dilakukan dengan 3 tahapan evaluasi diantaranya:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan diukur berdasarkan proses perencanaan program KOTAKU di Lokasi yang menjadi tujuan program KOTAKU
2. Evaluasi pada tahap pelaksana diukur berdasarkan Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
3. Evaluasi pada tahap pelaksanaan diukur berdasarkan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan permukiman dan ketercapaian yang didapatkan dari adanya program KOTAKU yang dilaksanakan.

2.3. Peningkatan Kualitas Permukiman

Dalam UU Nomor.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan, dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru yang terdiri atas:
 - a. Pengawasan dan pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. peningkatan kualitas dilakukan dengan pola-pola penanganan yang terbagi atas:
 - a. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali prasarana, sarana dan/atau utilitas umum agar dapat berfungsi dengan optimal, untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni;
 - b. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - c. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Judul (Peneliti/Tahun)	Tujuan	Variabel	Teknik Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan	Sumber
1	Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Gampong Telaga Tujuh, Kota Langsa, Aceh. (Dini Solehati, dkk, 2017)	Untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Gampong Telaga Tujuh	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi bangunan gedung • Kondisi jaringan jalan • Kondisi persampahan, • Kondisi penyediaan air minum • Kondisi drainase, • Kondisi pengelolaan persampahan, • Kondisi pengelolaan air limbah, • Kondisi proteksi kebakaran 	Metode kombinasi (mixed methods) antara metode kuantitatif dan metode kualitatif serta analisis AHP	Hasil analisis menunjukkan karakteristik permukiman kumuh adalah tidak memiliki keteraturan bangunan sebesar 100%, tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 80%, tidak tersedia drainase lingkungan sebesar 100%, tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya sebesar 100%, sistem air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebesar 100%, tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebesar 100%, dan tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran sebesar 100%.	<p><u>Persamaan:</u> Memiliki tujuan yang sama yaitu mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh, serta penggunaan variabel sama</p> <p><u>Perbedaan:</u> Metode yang digunakan.</p>	Jurnal Teknik Sipil. Vol. 1 No. 2 (2017). ISSN 2088-9321 Website: https://jurnal.usk.ac.id/JTS/article/view/9946
2.	Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh di Sekitar Taman Maccini Sombala Kota Makassar. (Irma Rahayu, Wahyuni, Jaharuddin (2020)	Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Maccini Sombala	Kondisi bangunan hunian, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengamanan kebakaran	Metode kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Taman Maccini Sombala, Jl. Maccini, Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar merupakan permukiman kumuh dengan kategori kumuh berat. Tingkat kekumuhan disebabkan oleh faktor penataan bangunan yang tidak teratur, kondisi jalan yang tidak efektif, saluran drainase yang kurang memadai, penyediaan TPS yang tidak ada, dan masyarakat yang	<p><u>Persamaan:</u> Memiliki tujuan yang sama yaitu mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh dan metode analisis yang digunakan</p> <p><u>Perbedaan:</u> Menganalisis kondisi karakteristik hanya dari aspek</p>	Jurnal Teknosains. Vol. 14 No. 2. Website: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/teknosains/article/view/14433

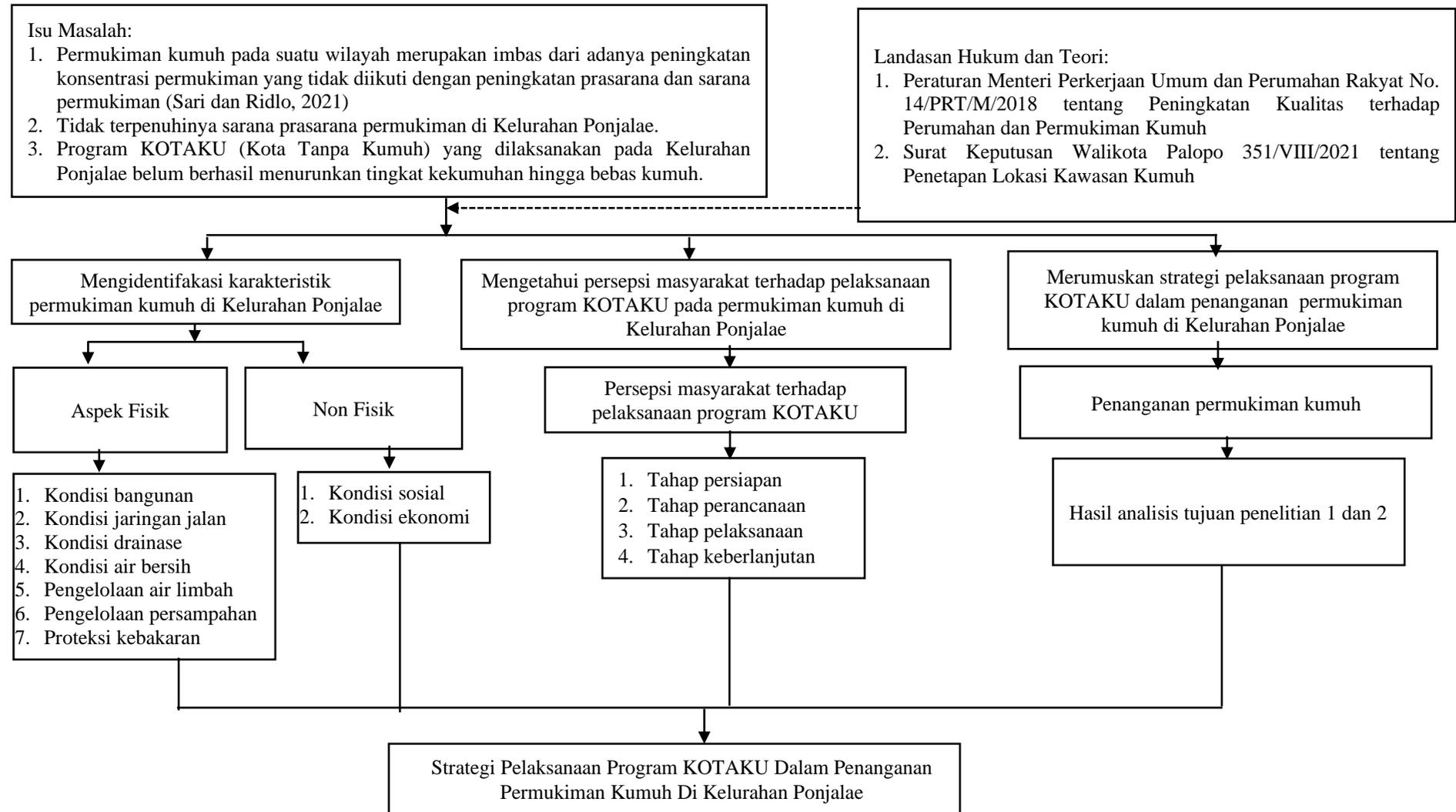
No	Judul (Peneliti/Tahun)	Tujuan	Variabel	Teknik Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan	Sumber
					kurang rasa sadar terhadap lingkungannya.	fisik tanpa mempertimbangkan aspek non fisik.serta lokasi penelitian yang berbeda	
3	Evaluasi Program KOTAKU Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Studi Kasus: Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso. (Yulvira B. Tangketau, 2022)	Mengetahui penilaian terhadap KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette dan arahan KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas, • Efisiensi, • Kecukupan (dampak/ manfaat), • Responsifitas, dan Ketepatan 	Analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, serta analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Kelurahan Lette cukup berhasil dalam mencapai tujuannya (cukup efektif), namun tidak efisien dalam pelaksanaannya. Program ini juga cukup berhasil dalam memberikan manfaat/dampak, persepsi masyarakat (responsifitas), dan ketepatan. Terdapat 2 arahan terhadap program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette yaitu, membentuk rancangan anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar permukiman kumuh semakin sempit dan MBR berkurang dan pengoptimalan kelompok kerja agar masyarakat ikut aktif dalam penanganan.	<p><u>Persamaan:</u> Metode yang digunakan sama</p> <p><u>Perbedaan:</u> Variabel yang digunakan.</p>	Jurnal WKM. Vol. 10 No. 1 (2022). ISSN 2355-0171 Website: Http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13676/
4	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten	Untuk merumuskan arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik bangunan: ketidakteraturan bangunan, kondisi konstruksi bangunan , kondisi jalan, drainase, sanitasi 	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini berupa arahan peningkatan kualitas permukiman berdasarkan hasil karakteristik permukiman kumuh dan faktor berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah studi, antara lain kondisi	<p><u>Persamaan:</u> Memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh</p> <p><u>Perbedaan:</u></p>	Jurnal Teknik ITS. Vol. 8 No. 2 (2019). ISSN 2337-3539 Website: https://ejournal.it.s.ac.id/index.php

No	Judul (Peneliti/Tahun)	Tujuan	Variabel	Teknik Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan	Sumber
	Sidoarjo. (Ririn Putri Kusuma dan Dian Rahmawati, 2019)	Tambak Cemandi, Sidoarjo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana: persampahan, air bersih, proteksi kebakaran, ketersediaan rth • Status lahan: kepemilikan lahan, kesesuaian peruntukkan • Kondisi ekonomi: jenis pekerjaan, pendapatan penduduk • Kondisi sosial: partisipasi masyarakat, perilaku masyarakat 		jalan, sanitasi, persampahan, pendapatan penduduk, partisipasi masyarakat dan perilaku masyarakat.	Metode analisis yang digunakan	/teknik/article/view/46525
5	Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. (St. Nurhalizah Mardjuni, Syafri Rahmawati Rahman (2021)	Mengidentifikasi penyebab Permukiman kumuh dan mengetahui strategi peningkatan kualitas Permukiman kumuh di Kelurahan Tallo Kota Makassar	Drainase, air minum, air limbah, dan persampahan	Metode analisis chi-square, serta analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber air minum dan kebutuhan air minum memiliki pengaruh kuat terhadap penyebab kekumuhan, sementara air limbah dan persampahan berpengaruh sedang. Strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Tallo meliputi memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah, mengacu pada SK Menteri No. 534/KTPS/M/200 tentang penataan permukiman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai dengan Permen PU No. 2 Tahun 2016 tentang perbaikan	<p><u>Persamaan:</u> Memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh</p> <p><u>Perbedaan:</u> Analisis chi-square yang tidak digunakan oleh peneliti, serta penggunaan variabel yang hanya 4 variabel</p>	Jurnal of urban planning studies. Vol. 1 No. 2. Website: https://ejournal.fakultasteknikuni-bos.id/index.php/jups/article/view/22

No	Judul (Peneliti/Tahun)	Tujuan	Variabel	Teknik Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan	Sumber
					kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Selain itu, perlu merawat jaringan jalan yang ada berdasarkan RTRW Kota Makassar 2015-2035 dan meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan seperti RP2KPKP, KOTAKU, dan SK Kumuh Walikota 2015.		

Sumber: penulis (2023)

2.5. Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

Sumber: penulis (2023)